

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PADA RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh:

EKA MISDARLINA

NPM : 2101120010.P

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2023

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : EKA MISDARLINA
Nomor Pokok/NIRM : 21.01.12.0010.P
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) PADA RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 19 Oktober 2023 Pembimbing 1 : Kusminaini Armin, SE, MM
NIDN. 0222086301

Tanggal 19 Oktober 2023 Pembimbing 2 : Riza Syahputera, SE, Ak, CA, CPA, MAK
NIDN. 0224108301

109 /PS/DFEB/ 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Tanggal 19 Oktober 2023

Tanggal 19 Oktober 2023



Dr. Msv. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205026401

Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205056710

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : EKA MISDARLINA
Nomor Pokok/NIRM : 21.01.12.0010.P
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) PADA RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Penguji Skripsi :

Tanggal 19 Oktober 2023 Ketua Penguji : Kusminaini Armin, SE, MM
NIDN. 0222086301

Tanggal 19 Oktober 2023 Penguji I : Riza Syahputera, SE.Ak.CA.CPA.,MAK
NIDN. 0224108301

Tanggal 19 Oktober 2023 Penguji II : Yuni Rachmawati, SE.M.Si.,Ak,CA
NIDN. 0219068804

109 / **PS/DFEB** / 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal 19 Oktober 2023



Dr. Msv. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi
Tanggal 19 Oktober 2023

Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205056710

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Misdarlina
Nomor Pokok/NPM : 2101120010.P
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di tulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan jiplakan atau copy paste karya orang lain. Dimana semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan Universitas Tridinanti Palembang.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan asli atau tiruan dari karya orang lain. Maka saya sanggup menjalankan sanksi berupa pembatalan Skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, September 2023


(Eka Misdarlina)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – QS Ar Rad 11

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap." (QS. Al-Insyirah: 6-8)

"Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan." (Eka Misdarlina)

Kupersembahkan kepada :

- Suami dan anak-anak yang tercinta
- Orang Tua yang tersayang
- Dosen pembimbingku
- Dosen-dosen Pengajar
- Teman Transisi 2021
- Almamater

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR FLOWCHART	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis	9
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	9
2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Untuk Sektor Publik	9
2.1.1.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.2 Sistem Pengendalian Intern.....	12
2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern	12
2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern.....	13
2.1.3 Badan Layanan Umum.....	20
2.1.3.1 Pengertian Badan Layanan Umum.....	20
2.1.3.2 Tujuan Badan Layanan Umum	23
2.1.3.3 Dasar Hukum Pembentukan Badan Layanan Umum	24
2.1.3.4 Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.....	25
2.1.3.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Badan Layanan Umum.....	29

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Badan Layanan Umum.....	31
2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Badan Layanan Umum.....	31
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan.....	32
2.3 Kerangka Berfikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.3 Populasi, Sample dan Sampling.....	42
3.4 Rancangan Penelitian.....	43
3.5 Variabel dan Definisi Operasional.....	43
3.6 Instrumen Penelitian.....	44
3.7 Teknik Analisa Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	48
4.1.2 Struktur Organisasi.....	50
4.1.3 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pada Rumah Sakit Khusus Paru. Provinsi Sumatera Selatan.....	60
4.1.3.1 Lingkungan Pengendalian.....	61
4.1.3.2 Pengendalian Resiko.....	62
4.1.3.3 Kegiatan Pengendalian.....	62
4.1.3.4 Informasi dan Komunikasi.....	64
4.1.3.5 Pemantauan.....	65
4.2. Pembahasan.....	65
4.2.1 Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern BLUD Pada Rumah Sakit Khusus Paru.Provinsi Sumatera Selatan.....	65
4.1.3.1 Lingkungan Pengendalian.....	66
4.1.3.2 Pengendalian Resiko.....	67
4.1.3.3 Kegiatan Pengendalian.....	69
4.1.3.4 Informasi dan Komunikasi.....	73
4.1.3.5 Pemantauan.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	34
3.1 Variabel dan Defini Operasional	44
4.1 Identifikasi Permasalahan	63
4.2 Daftar Barang Hilang.....	64

DAFTAR GAMBAR

2.1Unsur-Unsur Pengendalian Intern.....	19
4.1Struktur Organisasi.....	50

DAFTAR FLOWCHART

2.1 Kerangka Berfikir	39
------------------------------------	-----------

ABSTRAK

Eka Misdarlina. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di bimbing oleh Ibu Kusminaini Armin, SE, MM dan Bapak Riza Syahputera, SE.Ak.CA,CPAL.,MAk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan untuk menganalisa hasil evaluasi sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer. Dimana data primer dilakukan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari instansi yang kemudian akan diolah oleh peneliti, Data primer dalam penelitian ini berupa : Struktur organisasi, Standar Operasional Prosedur, Data Aset.

Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan masih adanya unsur pengendalian intern terutama pengelolaan aset daerah yang belum diterapkan dengan baik menunjukkan bahwa Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan. belum mampu dalam melakukan pengendalian intern pengelolaan Aset dan hal ini terbukti dengan masih adanya unsur-unsur pengendalian yang belum dilaksanakan dengan maksimal yaitu dari unsur penilaian resiko, unsur aktivitas pengendalian, dan juga unsur pengawasan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern

ABSTRACT

Eka Misdarlina. Analysis of the Implementation of the Regional Public Service Agency (BLUD) Internal Control System at the Special Lung Hospital of South Sumatra Province. Thesis for the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business. Supervised by Mrs. Kusminaini Armin, SE, MM and Mr. Riza Syahputera, SE.Ak.CA, CPAL., MAK.

This research aims to determine the application of the Internal Control System to the management of the Regional Public Service Agency (BLUD) and to analyze the results of the evaluation of the internal control system for financial management at the Special Lung Hospital of South Sumatra Province. The research data carried out is in the form of primary data. Where primary data is used, namely data obtained directly from agencies which will then be processed by researchers. Primary data in this research is in the form of: Organizational structure, Standard Operating Procedures, Asset Data.

The results of the research show that the internal control system of the Regional Public Service Agency (BLUD) at the Special Lung Hospital of South Sumatra Province shows that there are still elements of internal control, especially regional asset management, which have not been implemented properly, indicating that the Special Lung Hospital of South Sumatra Province. have not been able to carry out internal control over asset management and this is proven by the fact that there are still elements of control that have not been implemented optimally, namely the risk assessment element, the control activity element, and also the supervision element.

Keywords; Internal Control System

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Tuhan Yang maha Esa atas segala berkat dan anugrah-nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripri ini. Didasarkan pada hasil pengamatan yang penulis lakukan di RUMAH SAKIT KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA SELATAN yang berlokasi di Jalan Kol.H. Burlian KM. 6 Palembang. Praktek kerja lapangan ini dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Jurusan Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang. Selama pembuatan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, dorongan, bantuan dan kerjasama dari orang-orang di sekitar penulis, Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr.Msy.Mikial,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tridinanti Palembang
2. Ibu Meti Zuliyana, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tridinanti Palembang
3. Ibu Kusminaini Armin, SE, MM selaku dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu dan memberikan saran dalam membuat dan menyelesaikan Skripsi
4. Bapak Riza Syahputera SE,Ak.CA.CPAL,M.Ak Sebagai dosen Pembimbing 2 yang telah banyak membantu dan memberikan saran dalam membuat dan menyelesaikan Skripsi
5. Bapak dr. Asep Zainuddin, Sp.PK sebagai Plt. Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan

6. Seluruh pegawai Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan informasi penting bagi penulis
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tridianti Palembang yang telah membantu dan membimbing penulis menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Suami tercinta dan anak-anak tersayang yang sudah mencurahkan cinta, kasih sayang, doa dan dukungan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Orang tua dan teman-teman dan semua pihak yang telah membantu memberi dukungan dan doa kepada penulis hingga kelancaran pelaksanaan Skripsi ini.

Penulis menyadari Skripsi ini tidak sempurna. Namun, penulis berharap semoga laporan kerja praktek lapangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Palembang, September 2023

EKA MISDARLINA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik sebagai *good government* diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah bagian dari reformasi hidup pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang telah diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Arus reformasi berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi terutama pada bidang birokrasi pemerintahan yang menuntut beragam pengelolaan tentang pemerintahan yang baik, dalam pengelolaan ilmu akuntansi paling cepat dapat diterima sebagai salah satu alat/media yang dapat digunakan untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas melalui suatu penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP), diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2004 dan diganti dengan PP No 71 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. SAP pada tingkat pemerintah pusat telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur oleh peraturan

gubernur/bupati/walikota, yang telah mengacu pada peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) adalah serangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, hingga elemen lain dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan setidaknya telah mengatur mengenai format laporan keuangan untuk meningkatkan entitas akuntansi dan entitas pelaporan, prosedur akuntansi, bagan akuntansi standar, jurnal standar, dokumen transaksi yang akan digunakan. Sehingga dalam pembuatan suatu laporan keuangan pemerintah harus menggunakan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Penerapan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang baik secara konsep dapat berperan dalam menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik maka akan menimbulkan implikasi bagi manajemen untuk memberikan informasi kepada publik, yang salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi melainkan berfungsi dalam memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009: 159). Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan dengan adanya audit dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) berupa opini, yaitu: wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat.

Laporan keuangan merupakan produk yang telah dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga dengan entitas pemerintahnya yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas harus dibutuhkan SDM yang dapat memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan tersebut . Laporan keuangan merupakan media utama bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah harus mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. SAP dijelaskan bahwa dalam laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik atau ciri-ciri yang terdiri dari; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern (SPI).

Laporan keuangan yang berkualitas harus menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami posisi keuangan dan seluruh data transaksi dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), sehingga dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan disarankan kepada masing-masing kepala daerah melakukan langkah-langkah identifikasi penyebab, menempatkan personal yang kompeten, dan menyusun *action plan* untuk langkah perbaikan jika

adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, terutama di suatu rumah sakit.

Rumah sakit yaitu tempat pelayanan jasa kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan bersifat *non profit oriented*, yang telah didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan, perawatan, tindakan medis dan tindakan diagnosa lainnya yang akan dibutuhkan oleh para pasien dalam batas teknologi, sistem dan sarana yang tersedia di rumah sakit tersebut.

Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (836/MENKES/SK/VI/2005) rumah sakit dituntut untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja secara profesional dan tidak mengabaikan misi sosial yang dimilikinya, mengingat rumah sakit merupakan instansi pelayanan yang menyerap banyak tenaga kerja, dana dan sarana. Rumah sakit harus mampu merumuskan kebijakan strategi antara lain yaitu efisiensi dari dalam (organisasi, manajemen, keuangan dan SDM) serta harus mampu mengambil keputusan secara tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada disekitarnya.

Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan adalah rumah sakit milik pemerintah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dan telah menggunakan standar akuntansi keuangan (SAK) juga standar akuntansi pemerintah (SAP), dimana Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang telah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penyediaan barang/jasa yang dapat

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan melakukan kegiatan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, sehingga semua sistem atau prosedur yang ada telah ditetapkan dan ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No 1981 Tahun 2010 yaitu pedoman akuntansi rumah sakit.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan BLU sebagai bagian dari perbendaharaan negara telah disebutkan dalam Undang- Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara juga meliputi pengelolaan Badan Layanan Umum. Pembentukan BLU diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan. Fleksibilitas

adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 1 angka 2 Permendagri 79 Tahun 2018).

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu produk dari reformasi keuangan. Adanya reformasi keuangan berdampak pada kegiatan pelayanan BLU/BLUD kepada masyarakat. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang kini lebih mengedepankan efisiensi maupun efektivitas dan produktivitas pelayanan masyarakat, alih-alih mencari keuntungan. Namun fleksibilitas pengelolaan keuangan ini bukan tanpa masalah, masih banyak ditemukan kelemahan dalam prosedur pengelolaan keuangan BLUD.

Oleh karena itu untuk menjalankan kegiatan BLUD dengan baik maka sebuah pemerintahan memerlukan suatu sistem pengendalian intern. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa terciptanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilatarbelakangi dengan terselenggaranya suatu kegiatan dalam instansi pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan. secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Dengan tersedianya pengendalian internal ini dapat menjadi dasar kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Sistem Pengendalian Intern sangatlah berpengaruh untuk proses pengelolaan BLUD agar mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah Penerapan Sistem Pengendalian Internal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Internal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman, dan dokumentasi ilmiah.

2. Bagi Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan

Dapat memberikan gambaran mengenai penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Biduri, Sarwenda. 2018. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Faishol,Ahmad. 2017. *Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah pemerintahkabupaten lamongan. Jurnal penelitian ekonomi dan akuntansi, Vol 1 No. 3, Hal 205-212*
- Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti.2023. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Edisi Ketiga Cetakan Pertama Palembang
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, 2001.*Organisasi*, terjemahan Agus Dharma,(Jakarta:erlangga,), hal 120.
- Halim dan muhammad. 2018 *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Haryanto dkk 2017. *Akuntansi Sektor Publik.*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern
- Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.05/2015 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual No.13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum

Trianasari, 1996 *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta PT Gunung Agung

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni Walter 2012. *Metodelogi Penelitian*.Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Bab IX Pasal 35 Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif dan Ganti Rugi

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik